

**ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN  
EFEKTIVITAS PAD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Sri Rahayu  
NIM : 222015036**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN  
EFEKTIVITAS PAD PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Sri Rahayu  
NIM : 222015036**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Rahayu  
NIM : 222015036  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,            September 2019  
Penulis



Sri Rahayu

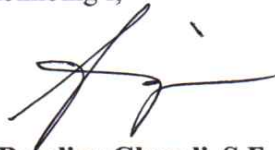
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.  
Nama : Sri Rahayu  
Nim : 222015036  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

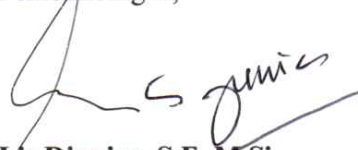
Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 2019  
Pembimbing,

Pembimbing I,



**Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., AK**  
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Pembimbing II,



**Lis Djuniar, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui  
Dekan  
d.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

- ❖ Jadi diri sendiri, cari jati diri, dapetin hidup yang mandiri, optimis karena hidup terus mengalir dan kehidupan berputar.
- ❖ Sesekali lihat kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung.

(Sri Rahayu)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,  
Kupersembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan ibukku tercinta (Sumilan dan Widarti)
- ❖ Pembimbing skripsiku (Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., AK & Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si)
- ❖ Adik – adikku tersayang (Roy Wibowo dan Muhammad Fahri Nur Akbar)
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Sahabat- sahabatku tercinta
- ❖ Teman seperjuanganku
- ❖ Almamater kebanggaanku

## PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PAD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Sumilan dan Ibuku Widarti, dan sahabat-sahabatku yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E., M.Si., AK dan

Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala serta pegawai di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang, September 2019

Sri Rahayu



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTARAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	11
1. Akuntansi Sektor Publik .....	11
a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	11

b. Tujuan Pengukuran Kinerja .....	12
c. Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja.....	13
d. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah .....	14
e. Informasi yang Digunakan Dalam Penilaian Kinerja .....	20
f. Rasio Keuangan Sektor Publik pada APBD .....	26
B. Penelitian Sebelumnya .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Oprasionalisasi Variabel .....	34
D. Data yang Digunakan .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum BPKAD Kota Palembang .....	40
2. Visi dan Misi BPKAD Kota Palembang.....	41
3. Struktur Organisasi.....	43
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	56
1. Analisis Varians Pendapatan.....	56
2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi .....	58

3. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah.....	60
4. Analisis Varians Belanja Daerah .....	61
5. Analisis Rasio Keserasian Belanja.....	63
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total belanja .....	63
b. Analisis Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah .....	64
6. Analisis Rasio Efisiensi Belanja .....	66

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang .....	7
Tabel I.2 Realisasi Anggaran Belanja Kota Palembang .....	8
Tabel II.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal .....	16
Tabel II.2 Kriteria Penilaian Nilai Efektivitas Pajak Daerah .....	16
Tabel II.3 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja .....	19
Tabel II.4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	20
Tabel II.5 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya .....	32
Tabel III.1 Oprasionalisasi Variabel .....	34
Tabel IV.1 Analisis Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	57
Tabel IV.2 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi .....	59
Tabel IV.3 Rasio Efektivitas Pajak Daerah .....	60
Tabel IV.4 Analisis Varians Belanja Daerah .....	62
Tabel IV.5 Analisis Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja .....	64
Tabel IV.6 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah .....	65
Tabe; IV.7 Analisis Efisiensi Belanja Daerah .....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang .....	45
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Selesai Riset .....
Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan.....
Lampiran 3 Sertifikat AIK .....
Lampiran 4 Sertifikat TOEFL.....
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..
Lampiran 6 Biodata Penulis .....

## Abstrak

### **Sri Rahayu/222015036/Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain varian pendapatan menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kota Palembang belum mampu merealisasikan anggaran pendapatan pada tahun tersebut hal ini disebabkan nilai rata-rata varians pendapatan tahun 2016-2018 sebesar Rp 323.607.803.657, Derajat desentralisasi dinilai sedang dengan rata-rata sebesar 28,10%, efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rata-rata 101,54%, anggaran belanjanya baik dengan rata-rata selisih anggaran belanja dan realisasi belanja sebesar Rp 400.206.609.826, keserasian belanjanya kurang serasi rata-rata sebesar 76,12% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Palembang pada tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 23,83%, dan efisiensi belanja dengan rata-rata tidak efisien.

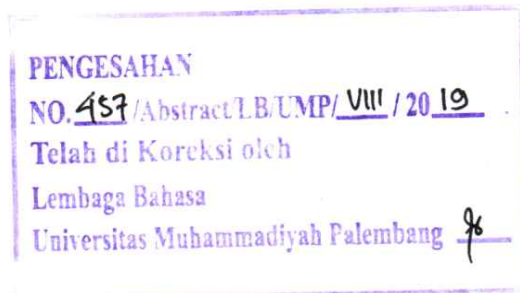
Kata kunci : Kinerja Realisasi APBD Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas PAD pada BPKAD.

### Abstract

**Sri Rahayu / 222015036 / The Performance Analysis of Regional Revenue and Expenditure to Improve the Efficiency and Effectiveness of Locally-generated Revenue in the Regional Financial and Asset Management Palembang.**

This study aimed to find out and analyze the performance of regional revenue and expenditure to improve the efficiency and effectiveness of locally-generated revenue in the Regional Financial and Asset Management Palembang. this study was descriptive research that was conducted at Regional Financial and Asset Management Palembang. The variable in this study was the performance analysis of regional revenue and expenditure to improve the efficiency and effectiveness of Locally-generated Revenue. The data used was primary and secondary data with interview technique and documentation. Based on the results of research that has been conducted on all data obtained in the Regional Financial and Asset Management Palembang, it could be concluded that including income variants indicating that the revenue performance of Palembang City has not been able to realize the revenue budget in that year due to the average income variance in 2016-2018 was Rp 323,607,803,657, The degree of decentralization was assessed to be moderate with an average of 28.10%, the effectiveness of local taxes was very effective with an average of 101.54%, the expenditure budget was good with the average difference between the budget and realization expenditures was Rp. 400,206,609,856, the compatibility of the expenditures was not as suitable as the average of 76.12% of total expenditure and it was used for operating expenditures on average capital expenditure for the total regional expenditure of Palembang in 2016-2018 having an average of 23.83%, and expenditure efficiency with an inefficient average.

Keywords: APBD Realization Performance to Increase Efficiency and Effectiveness of PAD in BPKAD





## **BAB I**

### **PENDAHULIAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek (Yoyo, 2017: 8-9).

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan bisnis akrual dalam laporan yang dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional,

belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit (Ramli, 2016:21). Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Ramli, 2016:21).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul, 2008: 230). Rasio keuangan ini merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif. Kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah (Ramli, 2016: 138).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut : 1) pendapatan-LRA, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/defisit-LRA, 5) penerimaan pembiayaan, 6) pengeluaran pembiayaan, 7) pembiayaan neto 8) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010: 83-84).

Ardon (2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang per bendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus didukung berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa penggunaan anggaran serta pengelolaan bendahara umum Negara atau Daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah. Rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan, setiap pejabat menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi

pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan yang bersangkutan. Menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/walikota, kepala satuan kerja perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paramitha dkk, (2014) Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang terutang dalam strategi planing. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacau pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut

telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pemerintah Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya dibutuhkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja keuangan serta kondisi keuangannya.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan usaha dan kesempatan. Kinerja sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kegiatan atau program kerja.

Menurut Mahsun (2012: 25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus, dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik. Kinerja adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan

indikator keungan yang menghasilkan gambaran hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan.

Memasuki era milenium ke-3, masyarakat Kota Palembang memiliki komitmen yang kuat bagi terwujudnya masyarakat madani yang adil dan makmur berdasarkan rasa persatuan bangsa. Potensi kekayaan daerah Kota Palembang yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk mewujudkan cita-cita dimasa depan. Sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia, Kota Palembang juga memiliki permasalahan pada kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan APBD Kota Palembang pada tabel I.1 dan tabel I.2 dibawah ini.

**Tabel I.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kota Palembang Tahun 2016– 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2016	Pendapatan asli daerah	840.572.306.099.31	781.413.947.765.14	92,96
	Pendapatan transfer	2.433.328.762.715.34	2.132.270.003.171.24	87,63
	Lain-lain pendapatan yang sah	192.233.045.058.63	209.219.176.258.63	108,84
	<b>Total</b>	<b>2.896.134.113.873.28</b>	<b>3.122.904.127.135.01</b>	<b>107,83</b>
2017	Pendapatan asli daerah	1.099.308.967.841.03	1.091.704.605.854,90	99,31
	Pendapatan transfer	2.454.180.417.266.77	2.307.939.678.493.49	94,04
	Lain-lain pendapatan yang sah	25.500.000.000.00	17.949.448.673.00	4,59
	<b>Total</b>	<b>3.578.989.385.107.80</b>	<b>3.417.593.733.021.39</b>	<b>95,49</b>
2018	Pendapatan asli daerah	1.100.505.155.700.04	953.257.612.127.74	86,62
	Pendapatan transfer	2.684.728.990.157.43	2.376.171.481.107.14	88,51
	Lain-lain pendapatan yang sah	166.800.790.197.99	156.409.070.615.00	93,77
	<b>Total</b>	<b>3.952.034.936.055.46</b>	<b>3.485.838.163.849.88</b>	<b>88,20</b>

Sumber : BPKD kota Palembang (Data diolah kembali), 2019

Berdasarkan Tabel I.I menunjukkan fenomena bahwa pendapatan daerah Kota Palembang selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami ketidakstabilan pendapatan. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, mengalami kenaikan serta penurunan. Pendapatan dapat dilihat dari nilai anggaran yang didapat.

**Tabel I.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja Kota Palembang**  
**Tahun 2016– 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2016	Belanja oprasi	2.555.026.150.570	2.335.937.833.701	91,43
	Belanja modal	812.338.278.189	577.697.336.830	71,12
	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	992.817.099	99,28
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.369.864.428.760</b>	<b>2.915.966.125.847</b>	<b>86,53</b>
2017	Belanja oprasi	2.489.421.736.518	2.283.607.852.669	91,73
	Belanja modal	889.936.798.165	857.095.134.848	94,42
	Belanja tidak terduga	2.650.000.000	64.000.000	2,42
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.383.208.534.684</b>	<b>3.141.848.658.597</b>	<b>92,37</b>
2018	Belanja oprasi	2.940.538.836.024.26	2.635.562.081.018.48	89,63
	Belanja modal	1.048.832.631.198.56	851.367.126.023.84	81,17
	Belanja tidak terduga	3.000.000.000.00	80.609.703.00	2,69
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>3.992.371.467.222.82</b>	<b>3.487.009.816.745.32</b>	<b>87,34</b>

Sumber : BPKD kota Palembang (Data diolah kembali), 2019

Berdasarkan Tabel I.2 menunjukkan fenomena bahwa belanja daerah Kota Palembang selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai 2018 juga mengalami ketidakstabilan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya anggaran keserasian belanja daerah menunjukkan



anggaran belanja daerah Kota Palembang tahun 2016-2018 sudah baik atau efisien, akan tetapi tidak terealisasinya anggaran belanja 100% menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja tidak terduga perlu dilihat dari keserasian belanja, sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja realisasi belanja pemerintah dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini Bagaimanakah kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman yang lebih baik terutama mengenai kinerja realisasi APBD daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai Kinerja Realisasi APBD daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anatasiah Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere (2015). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. *Jurnal Emba*, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal: 17-25
- Ardon Fridolin Honga, Ventje Ilat (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. *Jurnal Emba*, Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal: 278-288
- Baldric Siregar (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertanti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta
- Grace Yunita Liando, Ingriani Elim. (2016). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe*. *Jurnal Emba*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal: 1473-1484
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Marizka. (2010). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama*. Penerbit PT RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta.
- Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan dan Alifiulahtin Utaminingsih (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang : POLINEMA PRESS.
- Paramitha Sandy Mokodompit, Sifrid S. Pangemanan, Inggriani Elim. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. *Jurnal Emba*. Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal: 1521-1527
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Ramli Faud. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor Ghalia Indonesia.
- Siregar Syofian. (2015). *Statistka Terapan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru.
- Wempy Banga (2017). *Adminitrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Windhu. (2018). *Tata kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Yoyo Sudaryo, Nunung Ayu Sofiati. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI